

**POLITIK PEMILUKADA 2010:
Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada
di Dumai dan Indragiri Hulu**

**POLITIK PEMILUKADA 2010:
Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada
di Dumai dan Indragiri Hulu**

Editor: INDRA PAHLEVI

**Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
2011**

**POLITIK PEMILUKADA 2010:
Sebuah Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemilukada
di Dumai Dan Indragiri Hulu**

Editor:

Indra Pahlevi

Perancang Sampul:

Ahans Mahabbie

Perancang Tata Letak:

Sony Arifin

Penyelia Aksara:

Arief Setiawan

ISBN: 978-979-9052-61-2

Cetakan Pertama, 2011

Penerbit:

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Alamat Penerbit:

Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PENGANTAR EDITOR

Tahun 2010 merupakan tahun sibuk bagi KPU karena terselenggaranya 244 Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) baik untuk tingkat provinsi sejumlah 7 provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sejumlah 237 kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemilukada yang sejak tahun 2005 bersifat langsung menimbulkan berbagai macam eksekusi baik sosial-politik maupun eksekusi kultural sosiologis bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu yang perlu dicermati adalah bagaimana kesiapan penyelenggara atau KPU khususnya tingkat lokal dalam menyelenggarakan hajatan demokrasi ini.

Selanjutnya, tahun 2010 merupakan tahun pertama diselenggarakannya pemilukada serentak di suatu wilayah yang agenda pergantian kepala daerahnya berdekatan baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun provinsinya. Setidaknya penggabungan dua atau lebih pemilukada di suatu wilayah diperkirakan dapat menghemat biaya hingga 40 persen. Padahal, pada awalnya kebijakan pemilukada serentak ini sempat mengalami kegamanangan khususnya di DPR RI yang ditunjukkan oleh sikap beberapa fraksi di Komisi II seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Hanura yang mendesak Pemerintah untuk menunda penyelenggaraan pemilukada di daerah-daerah yang belum siap dari segi pembiayaan. DPR meminta Menteri Dalam Negeri menggunakan otoritasnya untuk memerintahkan penundaan pemilukada sampai selesainya masalah alokasi anggaran tersebut. Namun demikian akhirnya pemilukada tetap berlangsung meskipun kita tahu bahwa terjadi beberapa peristiwa bahkan hingga penundaan penyelenggaraannya karena terjadi konflik di daerah tersebut.

Dalam konteks munculnya berbagai persoalan di seputar penyelenggaraan pemilukada ini, maka Tim Politik Dalam Negeri Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) melakukan penelitian di dua kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Dumai. Penelitian ini hendak melihat bagaimana kesiapan pemerintah kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut dalam menyelenggarakan pemilukada termasuk kesiapan KPU-nya yang biasanya memiliki masalah penganggaran yang berimbas kepada profesionalisme kinerja KPU sebagai penyelenggara. Hal lain adalah munculnya politik anggaran di setiap penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan oleh bupati/walikota yang *incumbent* kemudian

ikut serta kembali dalam pemilukada. Kondisi tersebut sangat dirasakan di kedua wilayah lokasi penelitian yang berakibat terbatasnya sifat profesionalisme dari sebuah penyelenggara pemilu.

Permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana peran Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada yang diawali konflik Bawaslu dengan KPU terkait pembentukannya, sehingga di beberapa daerah termasuk Dumai dan Indragiri Hulu Panwas dibentuk oleh KPU meskipun akhirnya ketika ada Putusan MK tentang domain Bawaslu membentuk Panwas, Panwas yang ada tetap yang berjalan dengan penyesuaian masalah administrasi pembentukannya. Padahal di beberapa wilayah lain, sempat terjadi tarik menarik antara Panwas yang dibentuk KPU dengan Panwas yang dibentuk Bawaslu. Oleh karena itu permasalahan di seputar peran pengawas pada pemilukada menjadi sangat rumit apalagi ditambah dengan permasalahan anggaran yang sangat terbatas serta keterlambatan pencairannya.

Dalam melihat persoalan anggaran misalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2009 dan Surat Edaran (SE) mendagri Nomor 903/4546/SJ yang dinilai dapat menjadi solusi administratif bagi persoalan penganggaran pemilukada. Peraturan tersebut menyatakan bahwa daerah yang menggelar pemilukada tahun 2010, sementara tahapannya dimulai sejak tahun 2009, dapat mengambil kebijakan perubahan melalui keputusan kepala daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan diberitahukan kepada DPRD. Selanjutnya bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD-nya, sedangkan tahapan pemilukada harus segera dilaksanakan, maka sembari menunggu penetapan APBD, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah terkait penyediaan dana yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemilukada. Sementara bagi kabupaten/kota yang belum menganggarkan dalam RAPBD 2010, gubernur dalam evaluasi APBD dapat memerintahkan menyediakan anggaran untuk pemilukada. Prakteknya hal tersebut justru menjadi masalah karena menjadi tidak jelas serta adanya kepentingan *incumbent* dalam pemilukada.

Persoalan yang krusial lainnya adalah bagaimana KPU menyelenggarakan pemilukada yang sangat sarat dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu terutama *incumbent* yang kembali menjadi calon. Hal tersebut sangat terkait dengan sifat imparsialitas sebuah lembaga penyelenggara pemilu –termasuk pemilukada– dalam konteks hadirnya profesionalisme yang bermakna bersikap adil dan transparan serta akuntabel dalam setiap pelaksanaan tahapan disertai dengan kecakapan dari para komisionernya. Salah satu masalah penting adalah penyediaan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan pemilukada. Pengalaman pemilu legislatif tahun 2009 yang begitu buruk dalam pengelolaan serta penyediaan daftar pemilih menjadi sebuah ukuran bagi keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilukada pasca tahun 2009. Oleh karena itu patut dicermati bagaimana KPU menyiapkan daftar pemilih

serta persiapan setiap pelaksanaan tahapan pemilukada hingga tahap akhir yakni penetapan pasangan calon terpilih.

Dari hasil penelitian di Kota Dumai serta Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ini, Tim Politik Dalam Negeri melakukan analisis secara lebih mendalam dan ditulis dalam sebuah buku sederhana ini oleh semua anggota tim yaitu: Prayudi, Riris Katharina, Indra Pahlevi, Sitti Nur Solechah, Ahmad Budiman, Handrini Ardiyanti, Dedeh Haryati, Aryojati Ardipandanto, Debora Sanur, dan Dewi Sendhikasari. Hasil kajian dan analisis itu tertuang dalam sebuah buku yang diberi judul “POLITIK PEMILUKADA 2010” guna menggambarkan bagaimana penyelenggaraan pemilu-kada tahun 2010 khususnya di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kasus guna melihat penyelenggaraan pemilukada dan permasalahannya.

Dari Editor, semoga kehadiran buku sederhana ini dapat memperkaya khazanah literatur tentang pemilukada di Indonesia dengan tujuan semakin memperbaiki praktek demokrasi tingkat lokal untuk masa yang akan datang. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Jakarta, Maret 2011

Indra Pahlevi

DAFTAR ISI

Pengantar Editor.....	v
Daftar Isi.....	ix
BAGIAN I PEMILUKADA DUMAI 2010:	
Tinjauan Implementasi Regulasi Pemilukada	
<i>Siti Nur Solechah</i>	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	5
BAB III TEMUAN PENELITIAN.....	13
BAB IV PEMBAHASAN	17
BAB V PENUTUP.....	29
BAGIAN II STUDI ANGGARAN PEMILUKADA DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU	
<i>Riris Katharina</i>	35
BAB I PENDAHULUAN.....	37
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN	45
BAB IV PEMBAHASAN	53
BAB V PENUTUP.....	59
BAGIAN III PROFESIONALISME KPU KOTA DUMAI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA TAHUN 2010	
<i>Indra Pahlevi</i>	65
BAB I PENDAHULUAN.....	67
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN	79
BAB IV PEMBAHASAN	89
BAB V PENUTUP.....	95
BAGIAN IV PEMILUKADA DAN UPAYA MEWUJUDKAN DEMOKRASI: Studi terhadap Upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010	
<i>Aryojati Ardipandanto</i>	101

BAB I	PENDAHULUAN.....	103
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	111
BAB III	HASIL PENELITIAN	117
BAB IV	PEMBAHASAN	121
BAB V	PENUTUP.....	125
BAGIAN V	PERAN PANWAS DALAM PEMILUKADA WALIKOTA DUMAI PROVINSI RIAU	
	<i>Prayudi</i>	129
BAB I	PENDAHULUAN.....	131
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN	135
BAB III	HASIL PENELITIAN	139
BAB IV	PEMBAHASAN	145
BAB V	PENUTUP.....	167
BAGIAN VI	PEMGUATAN PERAN PANWASLU DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU-RIAU	
	<i>Dedeh Haryati</i>	171
BAB I	PENDAHULUAN.....	173
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	179
BAB III	HASIL PENELITIAN	191
BAB IV	PEMBAHASAN	197
BAB V	PENUTUP.....	211
BAGIAN VII	STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILUKADA KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU	
	<i>Ahmad Budiman</i>	217
BAB I	PENDAHULUAN.....	219
BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	223
BAB III	HASIL PENELITIAN	229
BAB IV	PEMBAHASAN	241
BAB V	PENUTUP.....	251
BAGIAN VIII	STRATEGI ELIT POLITIK PASANGAN CALON DALAM PEMENANGAN PEMILUKADA RIAU: Studi Kasus Kota Dumai	
	<i>Debora Sanur</i>	259
BAB I	PENDAHULUAN.....	261
BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	265
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	271
BAB IV	KESIMPULAN.....	287

BAGIAN IX PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMILUKADA DI KOTA DUMAI DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU	
<i>Dewi Sendhikasari D.</i>	293
BAB I PENDAHULUAN.....	295
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN.....	299
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	305
BAB IV KESIMPULAN.....	313
BAGIAN X MEDIA MASSA DAN PEMILUKADA	
<i>Handrini Ardiyanti</i>	319
BAB I PENDAHULUAN.....	321
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	323
BAB III PEMBAHASAN.....	327
BAB IV PENUTUP.....	341
Biografi Penulis	345

